



Analisis Emosi Presiden Donald Trump Terhadap Penarikan diri Amerika Serikat dari Paris Agreement

Irene F Sinaga

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip.undip.ac.id

ABSTRACT

USA was one of its parties who signed Paris Agreement on the first date it was open for signature. Nevertheless, the euphoria of leading the world by example could not last longer. It happened when Donald Trump was inaugurated as the 45th President of the US on January 2017, succeeding Barack Obama. He announced that US would withdraw from the Paris climate accord. With his announcement, President Trump has snubbed the international climate policy community, also confused numerous world leaders and civilians across the world. Previous article journals on US withdrawal from the accord mostly focused on the national interest of US, and effects of the US withdrawal from Paris Agreement on the accord. In the present paper, authour would find another factor behind influencing Trump's decision to quit from the accord connected emotion theory. Researcher argues that Trump's emotion specifically his anger is one of the factors that influences US quit from the Paris Agreement.

Keyword: *Donald Trump, Paris Agreement, Emotion*

PENDAHULUAN

Penarikan diri oleh AS dari Paris Agreement¹ cukup mengejutkan negara dunia dan tentu memberi dampak yang cukup besar terhadap misi kesepakatan ini mengingat AS merupakan negara penghasil emisi karbondioksida terbesar kedua di dunia setelah China yaitu sekitar 5,82 miliar ton emisi CO₂ per tahun (Statista, 2017). AS menjadi salah satu negara yang ikut dalam kesepakatan mengenai pengurangan emisi karbondioksida ini, bahkan menjadi negara paling awal ketika meratifikasi Paris Agreement (Philips, 2016). Saat AS memutuskan untuk bergabung dengan Paris Agreement negara ini berada di bawah kepemimpinan Barrack Obama. Namun ketika kepemimpinan itu berpindah, pada tahun 2017 AS oleh pemimpinnya saat itu, Donald Trump memilih untuk menarik diri dari kesepakatan yang sudah diikuti sejak 2015. *"In order to*

¹ Paris Agreement merupakan kesepakatan internasional tentang perubahan iklim. Tujuannya untuk mengurangi emisi gas karbondioksida (efek rumah kaca) di dunia setelah tahun 2020.

fulfil my solemn duty to the United States and its citizens, the US will withdraw from the Paris climate accord...” (The Guardian, 2017).

Alasan Trump keluar dari Paris Agreement ini masih diragukan, pasalnya ia menyatakan bahwa keputusannya itu untuk kepentingan warga AS dan menghindari kerugian bagi negaranya. Hal tersebut disampaikan oleh Trump pada pidato kemenangannya tahun 2017 lalu. Trump menyatakan bahwa Paris Agreement merupakan kesepakatan yang buruk (*bad deal*) bagi AS, dan keikutsertaan AS dalam kesepakatan ini berdampak terhadap daya saing ekonomi dan penciptaan lapangan kerja (CBS News, 2017). Pernyataan Trump ini dianggap kurang dapat diterima secara logis dikarenakan beberapa hal. Pertama, penarikan AS oleh Trump dari Paris Agreement ini bertentangan dengan suara mayoritas warga AS yang justru sangat mendukung AS untuk tetap berkomitmen terhadap Paris Agreement. Hal ini dibuktikan oleh hasil survei sampel nasional yang dibuat oleh *Harvard School of Public Health and Politico* secara acak pada April 2017 yang memperoleh hasil bahwa sekitar 62 persen warga AS mendukung untuk tetap mengikuti Paris Agreement (C2ES, 2017). Selain dari mayoritas warganya, dukungan juga datang dari sejumlah kelompok bisnis besar di AS seperti Apple, Google, Microsoft, Morgan Stanley, HP yang memberikan pernyataan bahwa dengan tetap berada di Paris Agreement, selain berkomitmen untuk lingkungan yang lebih baik, meratifikasi kesepakatan ini juga akan meningkatkan daya saing, menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi risiko bisnis (Horowitz, 2017). Kedua, alasan Trump yang menyatakan bahwa ini kesepakatan yang buruk dan tidak adil bagi AS tidak berdasarkan bukti. Pasalnya, setiap negara memiliki target sendiri sesuai dengan negaranya masing-masing. Ketiga, keluhan AS mengenai dana yang harus dibayarkan setiap negara untuk *Green Climate Fund*, yang mana sebenarnya negara-negara maju menjanjikan US\$10 milyar, sementara AS hanya bersedia membayar US\$3 milyar, dan baru membayar hanya US\$1 milyar dan berada di bawah kontribusi Korea Selatan (Robinson, 2017). Maka dari fakta-fakta ini timbul sebuah pertanyaan, mengapa AS di bawah Donald Trump mengambil kebijakan untuk keluar dari Paris Agreement ?

Penelitian ini menggunakan teori emosional sebagai pisau analisisnya. Neack (2008) menjelaskan bahwa setidaknya terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan untuk menganalisa kebijakan luar negeri dalam level analisis, yang mana dikategorikan ke dalam *Poliheuristic theory*. Di dalam *poliheuristic theory* ini terdapat dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah pendekatan rasionalitas, pendekatan ini melihat perilaku pemimpin dalam kaca mata rasionalis. Dalam hal ini, pemimpin dilihat sebagai aktor yang rasional. Pendekatan kedua ialah pendekatan kognitif, yang mana melihat bahwa keputusan yang diambil oleh pemimpin tidak disebabkan semata-mata pengaruh dari pemikiran rasional pemimpin saja, namun juga dipengaruhi oleh psikologis yang membentuk kognitif individu, yang mengakibatkan seorang pemimpin sering mengalami yang disebut *decision conflict* (Neack, 2008:52). Mc Dermott (dalam Hudson, 2014), menyatakan bahwasanya emosi individu merupakan salah satu faktor yang ikut memainkan peran dalam proses pengambilan keputusan. Emosi mempengaruhi individu melalui proses pembangunan dalam memotivasi tujuan-tujuan yang akan didapatkan oleh individu, contohnya seperti keinginan untuk memperoleh kekuasaan, afiliasi, kerjasama, atau bahkan intervensi. Secara umum, emosi ini dibagi menjadi dua bagian, emosi negatif dan emosi positif. Umumnya, emosi negatif menimbulkan permasalahan yang dapat mengganggu orang yang mengalaminya, bahkan berdampak pada orang lain dan masyarakat secara luas. Kemarahan salah satu emosi negatif yang paling sering ditemukan terkait dengan perilaku politik. Kemarahan dalam hal ini dapat diartikan sebagai adanya kesalahan atas perilaku yang tidak diinginkan, dan mengakibatkan peristiwa yang tidak diinginkan (Muluk, 2012).

Daniel Goleman di dalam bukunya menyebutkan beberapa sikap yang merupakan bentuk dari kemarahan, diantaranya yaitu mengamuk, bengis, jengkel, tidak suka, kesal hati dan mengganggu. Selain emosi negatif, ada emosi positif yang juga penting dalam politik. Emosi positif pada umumnya adalah emosi yang menyenangkan dan mendorong individu untuk mendekati stimulus seperti bahagia, puas, dihargai, dan lain-lain.

Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa isi. Teknik analisis ini biasa digunakan untuk meneliti tentang gaya kepemimpinan, karakteristik personal, motif pembuat keputusan, serta keyakinan pemimpin (Hermann dalam Klotz & Prakash 2008). Sedangkan untuk pengumpulan data akan menggunakan teknik studi pustaka, dimana pengumpulan data melalui arsip pidato, buku biografi Trump, pernyataan pers, unggahan twitter dan jurnal online yang terkait, majalah dan berita yang kredibel, serta artikel-artikel online.

PEMBAHASAN

Isu lingkungan merupakan isu yang banyak diperbincangkan di dunia internasional. Seiring meningkatnya perhatian negara-negara terhadap isu lingkungan berbagai kerjasama bilateral maupun multilateral dalam menanggulangi permasalahan lingkungan telah diupayakan. Pelaksanaan COP ke-21 UNFCCC (Sidang Konferensi Para Pihak Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Perubahan Iklim ke-21) di Paris pada 2015 dengan dihadiri oleh 195 negara yang merupakan para pihak pada UNFCCC, menjadi tonggak baru bagi Konvensi Perubahan Iklim (UNFCCC) untuk menyelesaikan permasalahan perubahan iklim. COP ke-21 yang kemudian dikenal dengan Paris Agreement menyebutkan bahwa tujuan Kesepakatan Paris adalah “menahan laju peningkatan temperatur global hingga di bawah 2 derajat celcius dari angka sebelum masa Revolusi Industri, dan mencapai upaya dalam membatasi perubahan temperatur hingga setidaknya 1.5 derajat celcius, karena memahami bahwa pembatasan ini akan secara signifikan mengurangi risiko dan dampak dari perubahan iklim” (UNFCCC, 2015). Dengan begitu, upaya ini diharapkan akan mengurangi risiko dan dampak yang merugikan dari perubahan iklim secara signifikan.

Paris Agreement juga memiliki tujuan global mengenai adaptasi yang tidak ada dalam UNFCCC sebelumnya, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas adaptif, memperkuat ketahanan dan mengurangi kerentanan terhadap perubahan iklim (Pasal 7.1). Dalam perjanjian ini ditentukan bahwa negara-negara harus lebih menekankan pada perencanaan adaptasi, dan berdasarkan pada perencanaan ini para pihak harus memperkuat kerjasama mereka, termasuk melalui transfer dana (Pasal 7). Adaptasi ini ditujukan dalam membantu negara-negara berkembang dalam memenuhi komitmennya seperti yang telah dibahas di Copenhagen Accord pada tahun 2009 oleh negara-negara Afrika. Untuk memungkinkan dan membantu negara-negara berkembang untuk memenuhi komitmen mereka, perjanjian mengamanatkan bahwa negara-negara maju menyediakan sumber daya keuangan (Pasal 9), mencatat pentingnya transfer teknologi (Pasal 10), dan menyerukan para pihak untuk bekerja sama dan meningkatkan kapasitas (Pasal 11) (UNFCCC, 1992).

Selain Paris Agreement, COP dari UNFCCC sudah menghasilkan beberapa kesepakatan sebelumnya, salah satunya Protokol Kyoto. Protokol Kyoto mengatur agar negara-negara Annex²

² Negara-negara Annex antara lain Australia, Austria, Belgia, Bulgaria, Kanada, Kroasia, Republik Ceko, Denmark, Estonia, European Community, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Islandia, Irlandia, Italia, Jepang, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Monaco, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Polandia, Portugal,

yang umumnya adalah negara-negara maju untuk menurunkan emisi gasnya paling sedikit 5% dari tingkat emisi tahun 1990 pada periode Komitmen I (2008 s.d 2012). Namun, keengganan negara Annex khususnya AS menyebabkan pelaksanaan Protokol Kyoto tidak berjalan dengan baik karena dinilai tidak adil dan memberatkan negara-negara maju. Kegagalan Protokol Kyoto ini mendorong UNFCCC untuk mencari penyelesaian dari permasalahan isu perubahan iklim. Paris Agreement dianggap menjadi harapan baru setelah kegagalan Protokol Kyoto sebagai suatu prosedur penyelesaian permasalahan perubahan iklim. Penilaian tersebut terjadi karena tanggapan positif negara-negara maju terhadap Paris Agreement serta adanya pandangan yang sama oleh negara-negara maju tersebut terhadap permasalahan perubahan iklim. Paris Agreement dinilai telah mampu membawa semua negara masuk dalam tujuan bersama dalam upaya penanggulangan masalah perubahan iklim (UNFCCC, n.d.). Selain hal tersebut, indikator lain yang menciptakan pandangan bahwa Paris Agreement dapat menanggulangi permasalahan perubahan iklim adalah keikutsertaan AS. Keikutsertaan AS dalam Paris Agreement menjadi kabar baik bagi UNFCCC mengingat AS merupakan salah satu negara penghasil emisi gas terbesar kedua di dunia setelah China yaitu sekitar 5,82 miliar ton emisi CO₂ per tahun (World Resources Institute, 2017).

Keikutsertaan AS di dalam kesepakatan ini membuat banyak negara yang menaruh harapannya dan berasumsi bahwa Paris Agreement ini akan jauh lebih baik daripada perjanjian mengenai isu perubahan iklim sebelumnya, seperti Protokol Kyoto. Selain turut serta dalam kesepakatan ini, AS sendiri di bawah kepemimpinan Obama memang sangat menunjukkan dukungannya terhadap kesepakatan ini. Bahkan AS menjadi penyumbang secara finansial bagi Paris Agreement, karena menurut Obama AS harus menjadi negara yang memberikan gambaran baik bagi negara lain, dimana sebagai negara dengan tingkat ekonomi dan penghasil emisi terbesar di dunia, AS juga dapat mempedulikan isu lingkungan. Selain memberi bantuan dalam finansial, AS di bawah Obama juga turut serta dalam melakukan negosiasi dengan negara lain untuk membahas mengenai masa depan kesepakatan ini, seperti dengan Tiongkok yang juga merupakan salah satu negara penghasil gas emisi terbesar di dunia. AS di bawah Obama memiliki tingkat keseriusan yang tinggi terhadap isu lingkungan dan komitmen yang tinggi terhadap Paris Agreement, hal tersebut terlihat dari tindakan dan keputusannya akan kesepakatan ini.

Presiden Donald Trump memang dikenal sebagai salah satu pemimpin dengan berita-berita kontroversinya, baik itu melalui ucapan maupun tindakannya. Hal tersebut dikarenakan Trump yang kerap sekali mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang penuh kontroversi dan kebijakan-kebijakannya. Sikap Trump yang demikian menimbulkan kekhawatiran akan memberi dampak besar bagi keadaan politik AS serta citra AS di mata dunia internasional. Kebijakan-kebijakan yang dipaparkan oleh Trump pada saat kampanye pun kurang mendapat respon positif dari mayoritas masyarakat AS. Mereka kurang menyukai Trump dan akhirnya memutuskan tidak memilih Trump, hal ini terlihat dari *popular vote* yang dimenangkan oleh lawannya, Hillary Clinton. Hingga terpilihnya Trump pun masih banyak dari masyarakat AS yang tidak menyukainya akibat gagasan dan kebijakan yang diungkapkan semasa kampanye (Djuyandi, 2016).

Sejak Trump menjabat pada Januari 2017 lalu ia telah banyak mengubah kebijakan luar negeri AS dari kebijakan yang dibuat pendahulunya, Barack Obama. Jika pada era Obama AS lebih terbuka dan menjalin banyak kerja sama internasional baik bilateral maupun multilateral,

Rumania, Russia, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Swiss, Ukraina, United Kingdom dan Irlandia Utara, Amerika Serikat.

berbanding terbalik dengan pemerintahan Trump yang lebih tertutup (Nichols dalam Kurniawati, 2019). Hal tersebut dapat dilihat dari kebijakan-kebijakannya yang seolah-olah menarik diri dari panggung internasional, mulai menarik AS dari *Trans Pasific Partnership*, pelarangan imigran Muslim masuk ke AS, menarik AS dari *Paris Agreement*, dan beberapa kebijakan-kebijakan lainnya, dan dari beberapa kebijakan Luar Negeri AS ini, Trump kerap sekali menggunakan perasaannya dalam mengambil suatu keputusan, seperti dalam pelarangan imigran Muslim masuk ke AS yang diyakini sebagai bentuk sensitifitas Trump terhadap umat Muslim. Hal ini terlihat dari pidato Trump yang pernah menyatakan “Kita harus waspada. Kita harus sangat berhati-hati. Dan kita tidak bisa membiarkan orang-orang dengan kebencian terhadap AS masuk ke negara ini” (CNN, 2016). Di dalam pidatonya ini, Trump seolah-olah melakukan pemecahan antar warga AS. Selain itu, keyakinan ini juga didorong oleh sikap Trump yang mana selama kampanye yang anti Islam dan selalu beranggapan bahwa AS memiliki masalah dengan umat Islam.

Selain itu, dalam penarikan AS dari TPP juga diyakini bahwa Trump turut menggunakan perasaan dan persepsinya dalam keputusan ini. Keluarnya AS dari TPP di bawah Trump diyakini karena landasan Trump yang dikenal sebagai pemimpin dengan ide-ide konservatif yang diketahui menjunjung kebijakan isolasionis dan cenderung memberikan respon negatif terhadap dinamika internasional yang menunjukkan keterbukaan antar negara, sehingga Trump juga melihat TPP sebagai sesuatu yang negatif dan memilih untuk keluar. Penggunaan perasaan dan ataupun emosi dalam pengambilan keputusan tersebut juga sangat mungkin terjadi saat Trump menyatakan untuk menarik AS dari perjanjian mengenai lingkungan, Paris Agreement.

Presiden Donald Trump memang dikenal sebagai salah satu dari sebagian banyak orang yang masuk dalam penyangkal perubahan iklim. Trump kerap sekali membuat pernyataan mengenai sikap skeptisnya terhadap isu perubahan iklim, bahkan ketika ia belum menjabat sebagai Presiden AS. Pernyataan-pernyataan tersebut biasanya dituliskan dalam media sosialnya seperti di akun twitternya, dan tidak jarang juga dilontarkan secara langsung dalam pidato ataupun wawancara. Sikap Donald Trump yang cenderung skeptis terhadap isu perubahan iklim ini tentu mempengaruhi kebijakan AS terhadap lingkungan. Semenjak Trump menjabat menjadi presiden AS, kebijakan luar negeri dan kebijakan nasional AS mengenai isu lingkungan juga banyak yang berubah. Ketidakpercayaan Trump terhadap isu perubahan iklim mendorong Trump mengubah kebijakan-kebijakan AS terhadap isu lingkungan baik itu nasional maupun internasional. Dalam kebijakan nasional AS, Trump telah mengubah beberapa kebijakan AS dan berbeda dari yang dibuat oleh pendahulunya, Barrack Obama. Seperti halnya kebijakan AS yang menghentikan agenda *Clean Power Plan*, mengakhiri Sistem Pemantauan Karbon NASA, memperbolehkan kembali penggunaan timah dan botol air minum di kawasan Taman Nasional yang mana Obama sebelumnya melakukan pelarangan penggunaannya di wilayah tersebut, dan masih banyak lagi kebijakan-kebijakan nasional AS mengenai isu lingkungan yang berubah di bawah kepemimpinan Donald Trump. Namun tidak hanya kebijakan nasional, Trump juga membuat perubahan terhadap kebijakan luar negeri AS mengenai lingkungan. Hal ini bisa dilihat dari penarikan diri AS dari Paris Agreement.

Donald Trump bukan tipe orang yang memberikan kepeduliannya terhadap isu lingkungan, dirinya bahkan sudah mengikuti perkembangan isu lingkungan jauh sebelum mencalonkan diri sebagai presiden dan mengolok-olok isu lingkungan dalam kampanye kepresidenannya. Trump berkali-kali mempertanyakan keberadaan *Global Warming* dan menyatakan bahwa *Global Warming* berdasar pada ilmu yang salah dan dengan data yang dimanipulasi (Dyllan, 2017). Dari sejak tahun 2011 hingga 2017 terhitung Trump sudah

membuat cuitan di twitter sekitar 115 mengenai isu perubahan iklim, dan semuanya berisi mengenai perasaan skeptis Trump terhadap perubahan iklim (Dyllan, 2017).

Gambar 1. Cuitan Twitter Donald Trump

The image shows a vertical list of five tweets from Donald J. Trump (@realDonaldTrump). Each tweet includes a profile picture, name, handle, and a downward arrow. The tweets are as follows:

- Tweet 1:** "It's extremely cold in NY & NJ—not good for flood victims. Where is global warming?"
- Tweet 2:** "Global warming is based on faulty science and manipulated data which is proven by the emails that were leaked"
- Tweet 3:** "Where's the global warming? 2013 was one of the least extreme years in weather on record"
- Tweet 4:** "It's freezing and snowing in New York--we need global warming!"
Engagement: 3,033 likes, 2:24 AM - Nov 8, 2012
- Tweet 5:** "It snowed over 4 inches this past weekend in New York City. It is still October. So much for Global Warming."
- Tweet 6:** "It's freezing outside, where the hell is "global warming"??"
Engagement: 25.5K likes, 6:00 AM - May 26, 2013



Donald J. Trump ✓
@realDonaldTrump



NBC News just called it the great freeze - coldest weather in years. Is our country still spending money on the GLOBAL WARMING HOAX?

♥ 1,160 6:48 AM - Jan 26, 2014



Donald J. Trump ✓
@realDonaldTrump



Record low temperatures and massive amounts of snow. Where the hell is GLOBAL WARMING?

♥ 843 11:23 AM - Feb 15, 2015 · Manhattan, NY



Donald J. Trump ✓
@realDonaldTrump



Wow, 25 degrees below zero, record cold and snow spell. Global warming anyone?

♥ 641 6:37 AM - Feb 16, 2015 · Manhattan, NY



Sumber: twitter.com

Cuitan ini hanya beberapa dari sekian banyak cuitan Trump di twitternya yang selalu mempertanyakan kebenaran perubahan iklim, bahkan tidak jarang meledek orang-orang yang mempercayai perubahan iklim ataupun yang melakukan penelitian mengenai perubahan iklim. Trump sering memberikan komentar-komentar sarkasnya melalui akun twitternya mengenai perubahan iklim. Dari cuitan Trump di akun twitternya ini menunjukkan sikap skeptis dan perasaan tidak sukanya terhadap isu perubahan iklim. Pernyataan-pernyataan Trump tersebut secara tidak langsung menyiratkan bahwa Trump tidak menganggap perubahan iklim sebagai sesuatu yang besar. Hal inilah yang diyakini sebagai salah satu pendorong yang sebenarnya mengapa AS akhirnya keluar dari Paris Agreement ketika pada kepemimpinan Trump.

Dalam masa kepemimpinannya, Trump juga merupakan salah satu sosok pemimpin yang kerap memberikan respon terhadap hal-hal yang terjadi, terlebih bila itu menyangkut AS, baik itu respon secara langsung maupun lewat cuitannya di akun Twitternya @realDonaldTrump. Seperti yang terjadi pada hari Kamis, 5 September lalu, Trump memberikan respon terhadap berita CNN mengenai “*Climate Forum*”, dimana dalam berita tersebut dijelaskan mengenai isu-isu iklim yang secara tidak langsung juga membahas mengenai keluarnya AS dari Paris Agreement. Donald Trump langsung memberikan responnya mengenai bahasan di dalam CNN tersebut dengan membuat sebuah *Thread* atau utasan di Twitter yang berisi delapan fakta-fakta yang menyangkal pembahasan di dalam forum yang dibuat oleh CNN tersebut. Cuitan dari Trump tersebut menggambarkan bahwa ia tidak terima dan tidak senang mendengar pembahasan tersebut. Trump bahkan membuat judul utasannya tersebut dengan *hashtag* atau tagar #FakeNewsCNN, dan beberapa ungkapan-ungkapannya dituliskan secara huruf kapital dan juga dibubuhi tanda seru pada beberapa kalimat yang pada umunya mencerminkan suatu penegasan.

Respon yang diberikan Trump dalam *thread* tersebut menunjukkan respon yang kurang baik mengenai pemanasan global, secara sempitnya Paris Agreement.

Gambar 2. Respon Twitter Donald Trump Tentang Climate Forum



Cuitan di atas merupakan salah satu dari beberapa isi *thread* Trump yang merespon *Climate forum* tersebut. Dari cuitan ini menunjukkan bagaimana penilaian Trump terhadap Paris Agreement. Trump menyatakan bahwa Paris Agreement itu “*the badly flawed*” yang hanya akan menyakiti warga AS dan justru menyelamatkan orang-orang yang menjadi pencemar.

Trump kerap sekali mengungkapkan dugaan atau persepsi negatifnya mengenai Paris Agreement yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Dalam pidatonya mengenai Paris Agreement di Gedung Putih pada 1 Juni 2017, Trump menyatakan bahwa Paris Agreement merugikan ekonomi AS dengan hilangnya lapangan kerja dan produksi ekonomi jauh berkurang di sektor-sektor utama. “*Compliance with the terms of the Paris Accord (...) could cost America as much as 2.7 million lost jobs by 2025, according to the National Economic Research Associates. This includes 440,000 fewer manufacturing jobs (...), including automobile jobs and the further decimation of vital American industries on which countless communities rely* (Garden, 2017). Namun pada kenyataannya Banyak penelitian lain menunjukkan kebalikan dari apa yang diklaim oleh Trump - bahwa kebijakan iklim dapat mengarah pada peningkatan pertumbuhan dan pekerjaan. Hal tersebut dapat dilihat dari studi OECD yang baru dirilis untuk G20 menunjukkan bahwa negara-negara G20 dapat memperoleh manfaat dari dorongan 5% terhadap pertumbuhan pada tahun 2050 jika mereka mengejar pembangunan ekonomi yang tahan iklim dan rendah karbon. Selain itu, terkait mengenai hilangnya lapangan pekerjaan apabila AS tetap berada di Paris Agreement justru berbanding terbalik dengan pernyataan IRENA (*International Renewable Energy Agency*) yang menyatakan bahwa pada tahun 2016 lalu industri tenaga surya dan angin mempekerjakan sekitar 777.000 orang di AS, dan lebih dari 8 juta secara global (Climate Analytics, 2017).

Kenyataan bahwa Trump yang memang merupakan seorang penyangkal perubahan iklim juga merupakan salah satu hal yang dianggap sebagai pendorong keluarnya AS dari Paris Agreement. Persepsi atau anggapan Trump yang menyatakan bahwa perubahan iklim itu ialah sesuatu yang tidak benar mempengaruhi respon Trump terhadap isu tersebut, dan mempengaruhi proses keluarnya AS dari Paris Agreement. Seperti yang dijelaskan oleh Neack bahwa persepsi seorang pemimpin juga dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Selain itu, paham konservatif yang dimiliki oleh Trump juga turut mempengaruhi bagaimana ia memandang Paris Agreement. Seorang konservatif memang akan cenderung menolak atau tertutup terhadap perubahan atau sesuatu yang baru, dan lebih memilih untuk tetap pada kebiasaan yang sudah ada sejak lama. Selain itu, mereka juga akan cenderung berpikiran negative terhadap suatu perubahan atau hal baru. Paris Agreement merupakan hal yang baru dan tentu membawa beberapa perubahan di dalamnya. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai sesuatu yang dihindari oleh kaum

konservatif, termasuk Trump. Trump yang konservatif membuatnya cenderung menangkap sisi negatif mengenai kesepakatan ini dibanding sisi positifnya, sehingga apapun yang ada dalam kesepakatan ini akan mendapat respon yang kurang baik dari Trump. Hal ini terlihat dari respon Trump mengenai Paris Agreement baik itu melalui pidatonya, maupun lewat akun media sosialnya. *"This Agreement gives foreign bureaucrats control over how much energy and how much we use right in America. So foreign bureaucrats are going to be controlling what we're using and what we are doing in our land in our country. No Way"* (Political Haze, 2016). Dalam pidato kemenangannya pada tahun 2017 lalu ini, Trump menyatakan bahwa Paris Agreement berniat mengontrol AS, dan ia tidak akan membiarkan itu terjadi. Padahal pada kenyataannya, mengenai pengurangan energi yang di sepakati dalam Paris Agreement adalah hak dari negara yang meratifikasi kesepakatan ini, yang artinya AS ataupun negara lain yang meratifikasi Paris Agreement memiliki target masing-masing.

Sikap Trump ini memberikan gambaran alasan penarikan diri AS dari Paris Agreement yang jelas membahas isu lingkungan. Trump dengan paham konservatifnya yang mempengaruhi cara pandangya terhadap suatu perubahan juga menjadi salah satu pembentuk sikap skeptisnya terhadap Paris Agreement yang merupakan hal yang baru dan membawa perubahan bagi AS. Pemikiran yang kurang baik mengenai Paris Agreement oleh Trump membentuk perasaan tidak suka terhadap kesepakatan ini. Selain itu, ketidakpercayaan Trump terhadap isu lingkungan yang menjadi pembahasan di Paris Agreement juga menjadi pendorong dalam proses pengambilan keputusan untuk membawa AS keluar dari Paris Agreement.

KESIMPULAN

Peelitian ini menyimpulkan bahwa keputusan AS di bawah Trump yang memilih keluar dari Paris Agreement merupakan pengaruh dari emosi Trump sebagai pembuat kebijakan. Para ahli dari teori emosi ini menyatakan bahwa emosi individu merupakan salah satu faktor yang ikut memainkan peran dalam proses pengambilan keputusan. Emosi mempengaruhi individu melalui proses pembangunan dalam memotivasi tujuan-tujuan yang akan didapatkan oleh individu. Hasil analisis menunjukkan bahwa dari beberapa bentuk-bentuk emosi di atas yang paling mempengaruhi Trump untuk keluar dari Paris Agreement adalah emosi negatif Trump. Perasaan dan persepsi Trump mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam keluarnya AS dari Paris Agreement. Trump sering sekali menyatakan bahwa semua itu adalah berita yang tidak benar, dan tidak ada yang namanya perubahan iklim. Bukan hanya di dalam pidato-pidatonya, cuitan-cuitannya di akun media sosial pun Trump sering sekali menyatakan perasaan tidak suka dan tidak percayanya akan isu ini. Trump juga kerap menunjukkan kemarahanannya apabila ada orang yang mengangkat isu lingkungan tentang perubahan iklim. Trump yang juga secara lantang menyatakan bahwa ia tidak suka dan tidak percaya mengenai perubahan iklim merupakan salah satu bukti mengenai keyakinan bahwa perasaan dan persepsi Trump turut andil dalam keputusan ini.

REFERENSI

- albert, K. (2016, 30 November). End of TPP Brings New Opportunities For China & U.S . *Helbert Wealth Management*. <https://www.scribd.com/document/340317915/End-of-Tpp-Brings-New-Opportunities-for-China-u-s-1> (diakses pada 1 Februari 2020)
- Breuning, M. (2007). *Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction*. New York: Palgrave MacMillan.

- Climate Analytics. (2017, June 14). *FACT CHECK: President Trump's speech on intention to withdraw from the Paris Agreement*. Climateanalytics.org: <https://climateanalytics.org/publications/2017/fact-check-president-trumps-speech-on-intention-to-withdraw-from-the-paris-agreement/> diambil 19 April 2020
- C2ES. (2017, 5 Agustus). *Dear President Trump*. <https://www.ceres.org/sites/default/files/Fact%20Sheets%20or%20misc%20files/ws-ad-05-08.pdf> (diakses pada 15 April 2019)
- CNN. (2016, 10 Maret). *Donald Trump: Islam membenci kita*: <http://m.cnnindonesia.com/internasional/20160310142118-134-1165666/donald-trump-islam-membenci-kita> (diakses pada 1 Februari 2020)
- Department for Work and Pensions . (2014). *The Use of Social Media for Research and Analysis: A Feasibility Study*. London: Social Science in Government.
- Detik.com. (2017, 7 Desember). *Akui Yerusalem Ibu kota Israel, Trump penuhi janji Kampanye*. <https://m.detik.com/news/internasional/d-3759255/akui-yerusalem-ibu-kota-Israel-Trump-penuhi-janji-kampanye> (diakses pada 1 Februari 2020)
- Djuyandi, Y. (2016, 14 November). *Meneropong Kebijakan Pertahanan Donald Trump dan Dampaknya Bagi Indonesia*. <https://internasional.kompas.com/read/2016/11/14/06325921/meneropong.kebijakan.pertahanan.do%20nald.trump.dan.dampaknya.bagi.indonesia?page=2> (diakses pada 23 April 2019)
- Dyllan, M. (2017, 1 Juni). *Donald Trump has tweeted climate change skepticism 115 times. Here's all of us*. <https://www.vox.com/policy-andpolitics/2017/6/1/15726472/trump-tweets-global-warming-paris-climate-agreement> (diakses pada 12 Desember 2019)
- Garden, R. (2017, June 1). *Statement by President Trump on the Paris Climate Accord*. The White House: <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-trump-paris-climate-accord/> diambil pada 23 April 2020
- Horowitz, C. I. (2017, 2 Juni). *Trump sparked a CEO revolt. Here's why*. <https://money.cnn.com/2017/06/02/news/companies/trump-ceo-revolt/index.html> (diakses pada 5 April 2019)
- Hudson, V. M. (2014). *Foreign Policy Analysis, Classic and Contemporary Theory*. Rowman and Littlefield.
- IESR. (2017, 5 Juni). *Implikasi Keluarnya Amerika Serikat dari Paris Agreement terhadap Agenda Perubahan Iklim Global (Bagian 1)*: <http://iesr.or.id/implikasi-keluarnya-amerika-serikat-dari-paris-agreement-terhadap-agenda-perubahan-iklim-global-bagian-1-2/> (diakses pada 11 Maret 2019)
- Jonathan Renshon dan Jennifer S. Lerner (2012). *Decision - Making, The Role Of Emotions In Foreign Policy . The Encyclopedia Of Peace Psychology, First Edition*. Vol.1.
- Kaufman, A. C. (2017, 3 Mei). *Only 2 Countries Aren't Part Of The Paris Agreement. Will The U.S. Be The Third?:* https://www.huffingtonpost.com/entry/countries-not-in-paris-agreement_us_5909ee4ce4b02655f842f072 (diakses pada 18 Maret 2019)
- Liputan6. (2015, Desember 13). *Upaya Perubahan Iklim Global Amerika Terhalang Partai Republik?*. <https://www.liputan6.com/global/read/2388823/upaya-perubahan-iklim-global-amerika-terhalang-partai-republik> (diakses pada 3 April 2019)
- Muluk, P. D. (2012). *Pengantar Psikologi Politik*. Raja Grafindo Persada.

- Mulyo, T. B. (2018). *Persetujuan Barack Obama terhadap Paris Agreement 2015*.
http://repository.unair.ac.id/69781/3/Jurnal_Fis.HI.20%2018%20Mul%20p.pdf
- Neack, Laura. 2008. *The New Foreign Policy: Power Seeking in a Globalized Era*. Plymouth:
Rowman & Littlefield Publishers.
- News, B. (2016, 27 Mei). *Donald Trump Would 'Cancel' Paris Climate Deal*.
<http://www.bbc.com/news/election-us-2016-36401174> (diakses pada 21 Juli 2019)